

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang kebijakan penanggulangan PSK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terhadap keberadaan PSK adalah dengan menggunakan Perda No 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda ini masih terlalu umum dan belum secara spesifik membahas penanggulangan terhadap PSK. Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2018, setidaknya ada 3 instansi yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab langsung terhadap penanggulangan PSK di Kabupaten Kuningan. Ke tiga instansi tersebut diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan, Satpol PP Kabupaten Kuningan dan Polres Kabupaten Kuningan.

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji Peraturan Daerah terkait dan bahan-bahan pustaka serta diperkuat dengan observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) tempat yang sering menjadi tempat mangkal PSK adalah daerah Linggarjati dan Sangkanhurip 2) Kebanyakan PSK yang ada di Kabupaten Kuningan merupakan PSK pendatang dan bukan asli warga Kuningan; 3) Kebanyakan para PSK di Kabupaten Kuningan merupakan korban perceraian, karena tidak sanggup menanggung beban hidup untuk menghidupi keluarga, akhirnya pekerjaan menjadi PSK pun dijalani; 4) kinerja ke 3 instansi yang bertugas dalam penanggulangan PSK belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya data yang jelas terkait jumlah PSK di Kabupaten Kuningan serta upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polres Kabupaten Kuningan pun hanya sebatas melakukan penertiban dalam bentuk razia, setelah ditangkap PSK pun dilepaskan kembali. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dan Polres Kabupaten Kuningan terkait razia PSK adalah tidak adanya rumah singgah sementara yang dapat digunakan untuk menampung PSK sebelum dipindahkan ke balai rehabilitasi di Palimanan. Sementara itu, panti rehabilitasi di Palimanan hanya menyediakan 10 kuota setiap tahunnya untuk merehabilitasi PSK yang berasal dari Kabupaten Kuningan.

Implikasi kajian dari tesis ini adalah: 1) Sebaiknya Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara sebelum PSK di pindahkan ke panti rehabilitasi di Palimanan; 2) Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sebaiknya menyiapkan rancangan peraturan daerah dalam hal penanggulangan PSK sebelum perkembangan prostitusi di Kabupaten Kuningan menjadi semakin besar; 3) PSK yang terjaring razia sebaiknya tidak dilepaskan begitu saja tetapi diberi pengarahan terlebih dahulu misalnya terkait dengan penyakit yang ditimbulkan akibat berganti-ganti pasangan dan juga peringatan tentang dosa.

Kata kunci: PSK, Kebijakan Pemerintah Daerah, Perda No 3 tahun 2018

ABSTRACT

This thesis discusses PSK prevention policies carried out by the Local Government of Kuningan Regency. Countermeasures undertaken by the Local Government of Kuningan Regency to the presence of PSK is using Regulation No. 3 of 2018 on Public Order and Peace Society. These regulations are still too general and not specifically discuss countermeasures against prostitutes. Based on the Regulation No. 3 of 2018, there are at least three agencies that have direct authority and responsibility for action on prostitutes in the Kuningan Regency. The three agencies to include the Department of Social and Labor Kuningan Regency, Civil Police Service of Kuningan regency and Police Resort of Kuningan.

The research is qualitative research in the form of descriptive analysis using normative juridical approach. The data collection is done by reviewing the Local Regulations related and library materials and reinforced with observation and interviews in the field. The results showed: 1) where it often becomes a hangout PSK is Linggarjati area and Sangkanhurip 2) Most of the prostitutes in the district of Kuningan is PSK migrants and not genuine residents of Brass; 3) Most of the prostitutes in the district of Kuningan are victims of divorce, because he could not bear the burden of life to support his family, eventually become prostitutes employment was undertaken; 4) the performance of all three institutions in charge of the response PSK is not optimal. This is evident from the lack of clear data regarding the number of prostitutes in the district of Kuningan as well as the efforts made by Civil Police Service of Kuningan Regency and Police Resort of Kuningan was merely to curb in the form of a raid, after being arrested PSK was released again. Obstacles faced by Civil Police Service of Kuningan Regency and Police Resort of Kuningan raids PSK is the absence of temporary shelters which can be used to accommodate PSK before being transferred to rehabilitation centers in Palimanan. Meanwhile, the rehabilitation center in Palimanan only provide 10 quotas each year to rehabilitate prostitutes who come from the Kuningan Regency.

Study the implications of this thesis are: 1) Better Local Government shelters as temporary shelters before PSK was transferred to a rehabilitation center in Palimanan; 2) The local government of Kuningan Regency should prepare draft local regulations in handling a PSK before the development of prostitution in the Kuningan Regency becomes larger; 3) PSK which netted should not be released for granted but are briefed in advance, for example associated with a disease caused by multiple partners and also warning about sin.

Keywords: PSK, Local Government Policy, Regulation No. 3 of 2018